

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini, dan masih akan terus berlanjut, implementasi *International Financial Report Statement* (IFRS) merupakan topik yang banyak dibahas oleh para pemerhati dan peneliti di berbagai negara termasuk di Indonesia. Sejak menetapkan diri melakukan harmonisasi dengan standar akuntansi yang berbasis internasional, Dewan standar Indoneisa telah melakukan berbagai kali revisi baik berupa penyempurnaan maupun penambahan standar yang baru. Laporan keuangan yang disusun berdasar Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) untuk tahun mulai 1 januari 2012 akan mirip secara substansial dengan laporan keuangan yang disusun berdasar IFRS. Perkembangan implementasi IFRS di Indonesia juga terekam di literature, *ceklis* PWC 2013 mendeskripsikan perkembangan terkini adopsi IFRS di Indonesia

Era globalisasi saat ini menuntut adanya suatu sistem akuntansi internasional yang dapat diberlakukan secara internasional di setiap negara, atau diperlukan adanya harmonisasi terhadap standar akuntansi

internasional, dengan tujuan agar dapat menghasilkan informasi keuangan yang dapat diperbandingkan, mempermudah dalam melakukan analisis kompetitif dan hubungan baik dengan pelanggan, supplier, investor, dan kreditor (Gamayuni dalam Pitasari, 2013). Untuk melindungi kepentingan stakeholders ini diperlukan adanya peraturan tentang pengungkapan wajib dalam laporan keuangan karena tanpa peraturan ini dapat membuat perusahaan menyembunyikan informasi penting yang seharusnya diungkapkan (Prawinandi et al., 2012).

Menurut (Gamayuni dalam Pitasari 2013), semua perusahaan go public dan multinasional di Indonesia diwajibkan untuk menerapkan standar akuntansi yang konvergen dengan IFRS untuk penyusunan laporan keuangan pada atau setelah 1 Januari 2012. Perusahaan yang menerapkan standar akuntansi keuangan berbasis IFRS maka diwajibkan untuk melakukan pengungkapan penuh (*Full Disclosure*). Pengungkapan dilakukan dengan membuat laporan keuangan atau laporan tahunan (*Annual Report*). Pengungkapan dalam annual report merupakan salah satu isu penting di dunia pasar modal. Annual report merupakan salah satu sumber utama informasi keuangan bagi sejumlah pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi terutama oleh pemegang saham dan investor untuk menentukan tujuan investasi mereka.

Menurut (Suhardjanto dan Miranti dalam Pitasari 2013) berpendapat bahwa terdapat dua sifat pengungkapan, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). *Mandatory disclosure* mengacu pada informasi yang harus diungkapkan sebagai konsekuensi dari adanya ketentuan perundang-undangan, pasar saham, komisi bursa saham, atau peraturan akuntansi dari

pihak yang berwenang, sedangkan *voluntary disclosure* merupakan informasi yang secara sukarela diungkapkan oleh perusahaan.

*Mandatory disclosure* bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan, memastikan pengendalian kualitas kinerja melalui ketaatan terhadap hukum dan standar akuntansi yang berlaku, memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kesehatan keuangan perusahaan dan menghitung beban masa depan sehingga investor dapat menentukan kesempatan pertumbuhan jangka panjang dan memperkirakan aliran kas keluar untuk suatu bisnis (Al Akra et al., dalam Prawinandi dkk., 2012).

Adanya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur di pasar modal menjadi bukti bahwa transparansi dan kepatuhan terhadap pengungkapan wajib masih kurang, terutama pada laporan laba rugi, misalnya kasus *mark-up* laporan keuangan PT Kimia Farma, Tbk yang *overstated*, yaitu laba pada laporan keuangan yang seharusnya Rp 99,594 miliar ditulis Rp 132,000 miliar sehingga terjadi penggelembungan laba bersih tahunan senilai Rp 32,668 miliar (Syahrul dalam Utami dkk., 2012). Manipulasi laporan keuangan PT Kimia Farma, Tbk terjadi karena lemahnya penerapan *corporate governance*. Kasus PT Kimia Farma, Tbk ini mengindikasikan pentingnya pengungkapan wajib dalam laporan keuangan. Pengungkapan wajib dalam laporan keuangan telah diatur dalam standar akuntansi internasional yaitu IFRS. Semua perusahaan *go public* dan multinasional di Indonesia diwajibkan untuk menerapkan standar akuntansi yang konvergen dengan IFRS (*Internasional Financial Reporting*

*Standards*) untuk penyusunan laporan keuangan pada atau setelah 1 Januari 2012 (Gamayuni dalam Prawinandi dkk., 2012).

Dewan Komisaris adalah organisasi Perseroan yang melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi untuk memastikan bahwa Perseroan dikelola sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan. Fungsi pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa Dewan Direksi telah patuh kepada hukum dan peraturan perundangan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya. Dewan Komisaris secara efektif menjalankan kewajibannya yang terefleksi melalui serangkaian keputusan pada sejumlah rapat. Tugas dewan komisaris adalah organisasi Perseroan yang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan pada umumnya maupun secara khusus, sesuai dengan batasan yang ditetapkan.

Proporsi komisaris independen dapat memastikan transparansi, struktur yang sehat, dan pengambilan keputusan yang rasional (Apostolou dan Nanopoulos dalam Utami, 2012). Dengan makin besarnya proporsi komisaris independen maka proses pengawasan yang dilakukan dewan ini makin berkualitas dengan makin banyaknya pihak independen dalam perusahaan yang menuntut adanya transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan (Nasution, Setiawan, dan Utami, dalam Novita, 2013).

Komite Audit memainkan peranan penting untuk mengawasi dan memantau proses pelaporan keuangan perusahaan, pengendalian internal, dan audit eksternal. Komite audit berperan sebagai penghubung komunikasi antara manajemen dengan auditor internal dan eksternal (Carcello *et al.* dalam Sutaryo dkk., 2011). Kep-

29/PM/2004 menjelaskan bahwa tugas komite audit adalah memberi pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh dewan direksi kepada dewan komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris.

Rapat dewan komisaris merupakan suatu yang harus dilalui untuk mengambil keputusan dalam pengambilan kebijakan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh (Chidambaran dalam Suhardjanto dkk., 2012) menunjukkan bahwa semakin banyak frekuensi rapat yang diselenggarakan dewan komisaris maka semakin meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan demikian semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat maka akan meningkatkan kepatuhan pengungkapan.

Penelitian ini replikasi dari penelitian Anggita Pitasari yang dilakukan tahun 2013 yaitu Analisis Pengaruh Struktur Corporate Governance terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib Konvergensi IFRS pada Laporan Laba Rugi Komprehensif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan adalah perbedaan tahun penelitian dan sampel. Penelitian Pitasari (2013) menggunakan tahun sampel 2010-2012 pada perusahaan jasa sementara penelitian ini dilakukan pada tahun 2012 dan 2013 dari seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini lebih menekankan pada pengaruh struktur corporate governance yang menetapkan IFRS pada perusahaan di Indonesia setelah januari 2012 sehingga data yang dikumpulkan sesuai dengan data perkembangan saat ini. Perbedaan yang lain yaitu sampel dari penelitian ini menambahkan latar belakang pendidikan komisaris karena latar belakang pendidikan dewan komisaris

merupakan faktor yang menentukan *social disclosure* dalam *annual report* perusahaan. Komisaris utama yang memiliki latar belakang pendidikan bisnis akan lebih baik dalam mengelola bisnis dan mengambil keputusan (Bray, Howard, dan Golan, dalam Suhardjanto dkk., 2010). Objek penelitian ini adalah laporan tahunan dan laporan keuangan terutama berfokus pada laporan laba rugi komprehensif perusahaan laporan laba rugi komprehensif merupakan laporan yang selalu diperhatikan oleh *stakeholders* dalam *annual report* sebagai pedoman mereka dalam mengambil keputusan. Selain itu, laporan laba rugi komprehensif juga menggambarkan kinerja perusahaan dalam satu periode pelaporan.

## **B. Batasan Masalah Penelitian**

Batasan dalam penelitian ini, perusahaan yang diteliti adalah perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012 dan 2013. Pengaruh struktur *Corporate Governance* dalam penelitian ini adalah jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, latar belakang pendidikan komisaris, jumlah anggota komite audit, dan jumlah rapat komite audit.

## **C. Rumusan Masalah Penelitian**

1. Apakah jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS ?
2. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS ?

3. Apakah jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS ?
4. Apakah latar belakang pendidikan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS?
5. Apakah jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS ?
6. Apakah jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris, rapat dewan komisaris, latar belakang pendidikan, jumlah anggota komite dan jumlah rapat komite audit berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS ?

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan kontribusi dari berbagai bidang yang berkaitan:

##### 1. Praktisi

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman lebih tentang pentingnya pengungkapan wajib dalam laporan keuangan.

- b. Memberikan pemahaman tentang seberapa besar pengaruh struktur *corporate governance* terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS pada perusahaan Manufaktur.
2. Teoritis
- a. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh struktur *corporate governance* terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS. Diharapkan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan memberikan hasil penelitian mengenai analisis pengaruh *Corporate Governance* terhadap Tingkat Kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS pada